

Kode>Nama Rumpun Ilmu: 181/Sosial Ekonomi Pertanian

**Laporan Akhir**  
**PENELITIAN DOSEN FAKULTAS PERTANIAN**



**KAJIAN EKONOMI WILAYAH DALAM PEMBANGUNAN**  
**KAWASAN PERKOTAAN BARU (KPB) BERBASIS**  
**PERTANIAN KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**Dr. Ir. Faidil Tanjung, MSi. NIDN. 0011106706 (Ketua)**  
**Ir. Zelvi Zakir, MS NIDN. 0011036308 (Anggota)**  
**Ir. Yusri Usman, MS NIDN. 0001065816 (Anggota)**

**Dibiayai dengan Dana DIPA Universitas Andalas**  
**Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian**  
**Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas.**  
**No. 07/PL/SPK/PNP/Faperta-Unand/2017**

**FAKULTAS PERTANIAN**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**Desember 2017**

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

**1. Judul Penelitian :** Kajian Ekonomi Wilayah Dalam Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Berbasis Pertanian Kabupaten Solok Selatan

### 2. Tim Peneliti

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1	Dr. Ir. Faidil Tanjung, M.Si.	Ketua	Ekonomi Pertanian	UNAND	12
2	Ir. Zelvi Zakir, MS	Anggota	Analisa Kelayakan Proyek	UNAND	10
3	Ir. Yusri Usman, MS	Anggota	Ekonomi Pertanian	UNAND	10

**3. Objek Penelitian** (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

Ekonomi wilayah pada Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru (KPB)

### 4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan: Juni Tahun: 2017

Berakhir : bulan: Desember Tahun: 2017

### 5. Usulan Biaya

Tahun ke-1 : Rp 17.500.000

Tahun ke-2 : Rp 17.500.000

Tahun ke-3 : Rp -

**6. Lokasi Penelitian** ( lapangan ):

Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat

**7. Instansi lain yang terlibat :**

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan  
Kontribusinya : (1) penyediaan data sekunder; (2) Mengakomodasi temuan dalam penyusunan program untuk implementasi kegiatan tahun anggaran 2018 dan 2019.

**8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu** (tekanan pada gagasan fundamental dan orisinil yang akan mendukung pengembangan iptek)

Temuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah model pembangunan pusat pertumbuhan (*growth pole*) berbasis pertanian pada Kawasan Perkotaan Baru

(KPB) di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat. KPB sebagai pusat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menghendaki adanya dukungan dari sektor pertanian. Sehingga metode yang diperlukan adalah pendekatan pembangunan pertanian berbasis ekoregion, dan sosioekologis diharapkan mampu menghadapi tantangan pembangunan ekoregion karena inovasi teknologi tidak selalu merupakan solusi terbaik, sehingga pendekatan non-teknis seperti pendekatan ekoregion diharapkan mampu menyumbang solusi yang lebih baik bagi pembangunan wilayah berbasis pertanian. Pendekatan inilah yang diharapkan berkontribusi dalam pembangunan wilayah.

## **DAFTAR ISI**

	Hal
Halaman Pengesahan .....	ii
Identitas dan Uraian Umum .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Ringkasan .....	v
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Penelitian .....	2
1.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian .....	2
1.4. Manfaat Penelitian .....	3
1.5. Rencana Capaian Target Tahunan .....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.2. Peta Jalan Penelitian .....	5
2.1. Kajian Pustaka (State of the Art).....	7
III. METODE PENELITIAN .....	13
3.1. Desain Penelitian .....	13
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian .....	13
3.3. Tahapan dan Metoda Untuk Pencapaian Tujuan Penelitian .....	14
3.4. Analisis Data .....	16
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	17
4.1. Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Daerah Tertinggal di Sumatera Barat.....	17
4.2. Komoditi Unggulan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat.	
4.3. Klasifikasi Pertumbuhan Sektor Ekonomi Wilayah di Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat.	
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	
5.2. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	19
Lampiran-Lampiran	20

## Kajian Ekonomi Wilayah Dalam Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Berbasis Pertanian Kabupaten Solok Selatan

### Ringkasan

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan dengan menggerakkan sumberdaya dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah, namun cenderung tidak memunculkan kesejahteraan melainkan memperlebar ketimpangan (disparitas) pembangunan antar wilayah. Realitas ketimpangan ini didaulat sebagai bentuk pembangunan tidak merata dan cenderung tertuju pada wilayah yang menguntungkan secara ekonomis belaka. Disisi lain, ketimpangan pembangunan cenderung mengancam ketahanan pangan wilayah padahal daerah tersebut menjadikan pertanian sebagai penggerak pembangunan. Memperkuat daya saing komoditi unggulan pada suatu wilayah menjadi kekuatan dalam membangun pusat pertumbuhan (*growth pole*). Hal inilah diyakini menjadi energy untuk mempersempit ketimpangan pembangunan wilayah dengan memperhatikan ekoregion pertanian.

Penelitian ini bertujuan; (1) mengetahui tingkat disparitas pembangunan dan faktor penyebabnya; (2) mengetahui komoditi unggulan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (3) melakukan sintesis keterkaitan antara disparitas pembangunan, daya saing dan komoditi unggulan dengan ketahanan pangan wilayah; (4) menganalisis Model pusat pertumbuhan (*growth pole*) ekoregion pertanian pada masing-masing kabupaten tertinggal di Sumatera Barat. Pada keseluruhan tujuan ini adalah untuk mencapai kajian kawasan perkotaan baru (KPB) berbasis pertanian di Sumatera Barat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan yang sedang mengembangkan Kawasan Perkotaan Baru (KPB). Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kuantitatif dengan analisis data menggunakan pendekatan Location Quotient, Tipologi Klassen, Indeks Williamson, dan Indeks Entropi Theil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Solok Selatan memiliki ketimpangan pendapatan wilayah yang relatif rendah dibandingkan dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya. Rendahnya ketimpangan pendapatan di daerah ini karena masih dominannya sektor pertanian dalam struktur ekonomi daerahnya dan sektor industri merupakan sektor yang menyebabkan terjadi ketimpangan pendapatan wilayah di daerah kabupaten tertinggal tersebut. Sektor pertanian menjadi *developed sector* dan memiliki lebih dari satu komoditi unggulan dan komoditi berdaya saing di setiap sub-sektor pertanian. Pengembangan kawasan perkotaan baru (KPB) di Kabupaten Solok Selatan tetap mengedepankan pengembangan komoditi pertanian unggulan pada daerah tersebut daripada sektor industri yang dapat memacu ketimpangan daerah.

Kata-kata kunci: ekoregion pertanian, ketimpangan pembangunan, sektor unggulan

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan pertanian sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai peranan yang strategis dalam pemulihan ekonomi nasional. Peranan strategis tersebut khususnya adalah dalam peningkatan pendapatan daerah, penyediaan pangan, penyediaan bahan baku industri, peningkatan ekspor dan devisa negara, penyediaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Blakely E. J, 1989). Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor.

Kesenjangan antar daerah seringkali menjadi permasalahan yang serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki. Adanya kecenderungan pemilik modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi juga tenaga terampil. Disamping itu juga adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat kepada daerah seperti Provinsi atau kecamatan (Kuncoro, 2004)

Pembangunan berdimensi wilayah secara umum sering disebut pembangunan ekonomi regional dalam konteks perekonomian makro, misalnya pembangunan ekonomi daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Dalam konteks operasional pembangunan berdimensi wilayah terkait dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan pada kawasan tertentu yang merupakan wilayah pembangunan.

Pembangunan pertanian dalam konteks ekoregion juga harus mampu membangun dan memanfaatkan potensi ekoregion yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong penguatan jejaring sosio-ekoregion untuk mengurangi dampak eksploitasi dan pemanfaatan berlebih terhadap sumber daya dalam ekoregion tersebut. Pendekatan sosioekologis juga diharapkan mampu menghadapi tantangan pembangunan ekoregion karena inovasi teknologi tidak selalu merupakan solusi terbaik, sehingga pendekatan non-teknis diharapkan mampu menyumbang solusi yang lebih baik bagi pengembangan sector dalam konteks ekoregion.

Ada dugaan bahwa krisis pangan akan semakin pendek siklusnya dan semakin terkait dengan krisis politik yang melanda berbagai negara dan tidak bisa lepas dari stabilitas ekonomi politik nasional maupun global. Krisis pangan global akan mempengaruhi krisis ekonomi dunia yang telah melanda beberapa negara. Indonesia dalam kurun waktu 2014–2019 akan berada di persimpangan jalan yaitu apakah Indonesia akan mampu menghadapi pemasalahan dan tantangan krisis pangan dengan melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan yang memperlemah kemampuan produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Pembangunan ekonomi wilayah dihadapkan pada persoalan ketimpangan pembangunan yang semakin lebar, dan terancamnya ketahanan pangan wilayah. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, kesenjangan atau ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antardaerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah. Pada posisi inilah penelitian tentang Pembangunan Pertanian Berbasis Ekoregion Kuansing (Ketimpangan Pembangunan, Keunggulan Sektor, Daya Saing) dan Kaitannya Dengan Ketahanan Pangan Rumahtangga dan Wilayah Pada Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat penting untuk dilakukan.

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Sistem pemerintahan dan pembangunan daerah yang sangat sentralisasi dan sangat dominan oleh pemerintah pusat ternyata telah menimbulkan berbagai

permasalahan pembangunan daerah yang sangat serius. Proses pembangunan daerah secara keseluruhan menjadi kurang efisien dan ketimpangan wilayah semakin besar. Keadaan tersebut terjadi karena sistem pembangunan yang terpusat cenderung mengambil kebijakan yang seragam dan mengabaikan perbedaan potensi daerah yang sangat besar. Dengan demikian, banyak potensi daerah, baik sumberdaya alam maupun sumber daya manusia yang belum dapat di manfaatkan secara maksimal. Sementara itu, daerah yang potensi daerahnya kebetulan sesuai dengan kebijaksanaan nasional akan dapat tumbuh dengan cepat. Sedangkan daerah yang potensinya tidak sesuai dengan prioritas pembangunan nasional akan cenderung tertekan pertumbuhan ekonominya. Akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung melebar yang selanjutnya cenderung pula mendorong terjadinya keresahan sosial di daerah (Sjafrizal, 2014).

Kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang No 32 tahun 2004 memberikan kewenangan yang besar pada daerah dalam mengelola pemerintahan dan sumberdaya daerah termasuk kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumberdaya alam yang diiringi dengan tanggung jawab pembiayaan pembangunan daerah yang porsinya semakin meningkat. Berkaitan dengan upaya pembangunan daerah, maka pengembangan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal sebagai pusat pertumbuhan perlu diperkuat.

Sumatera Barat terdiri dari 19 daerah (Kabupaten dan Kota), merupakan daerah yang didominasi sektor pertanian sebagai basis pertumbuhan ekonominya, terutama pada daerah kabupaten. Pada saat ini (2016), propinsi Sumatera Barat masih menyisakan 3 kabupaten yang tergolong tertinggal yakni (1) Kabupaten Solok Selatan; (2) Kabupaten Pasaman Barat; dan (3) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ke-tiga kabupaten ini sangat mengantungkan pertumbuhan ekonominya dari sector pertanian, namun sektor ini dianggap belum mampu mengangkat daerah ini untuk tumbuh seperti daerah lainya di Sumatera Barat. Persoalan muncul dengan penetapan 3 kabupaten tertinggal ini, apakah sektor pertanian yang mendominasi ekonomi daerah tersebut dianggap tidak mampu untuk mengantarkan daerah ini keluar dari ketertinggalan dan menjamin ketahanan pangan wilayahnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat ketimpangan pembangunan dan faktor penyebabnya di kabupaten Solok Selatan
2. Komoditi apa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan.
3. Bagaimanakah daya saing komoditi pertanian pada kawasan KPB di Kabupaten Solok Selatan
4. Bagaimanakah implementasi Model pusat pertumbuhan (*growth pole*) ekoregion pertanian pada kawasan perkotaan baru (KPB) kabupaten Solok Selatan..

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk membangun ekonomi wilayah dengan pendekatan ekoregion berbasis pertanian pada kabupaten tertinggal di Sumatera Barat. Penelitian ini mempunyai tujuan khusus sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan dan faktor penyebabnya di kabupaten Solok Selatan
2. Mengetahui komoditi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan.
3. Mengetahui daya saing komoditi pertanian pada kawasan KPB di Kabupaten Solok Selatan
4. Menganalisis implementasi model pusat pertumbuhan (*growth pole*) ekoregion pertanian pada kawasan perkotaan baru (KPB) kabupaten Solok Selatan..

### **1.4. Urgensi (Keutamaan) Penelitian**

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dalam mengatasi kemiskinan, ketimpangan pembangunan. Premis ini menjadi ironis tatkala dihadapkan pada realitas bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah tetap saja memunculkan persoalan meliputi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan baik social maupun ekonomi.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan dengan menggerakkan sumberdaya dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah,

namun cenderung tidak memunculkan kesejahteraan melainkan memperlebar ketimpangan (disparitas) pembangunan antar wilayah. Realitas ketimpangan ini didaulat sebagai bentuk pembangunan tidak merata dan cenderung tertuju pada wilayah yang menguntungkan secara ekonomis belaka. Disisi lain, ketimpangan pembangunan cenderung mengancam ketahanan pangan wilayah padahal daerah tersebut menjadikan pertanian sebagai penggerak pembangunan. Memperkuat daya saing komoditi unggulan pada suatu wilayah menjadi kekuatan dalam membangun pusat pertumbuhan (*growth pole*). Hal inilah diyakini menjadi energy untuk mempersempit ketimpangan pembangunan wilayah dengan memperhatikan ekoregion pertanian.

Hasil penelitian ini diharapkan memunculkan suatu model pembangunan wilayah melalui pembentukan pusat pertumbuhan (*growth pole*) berbasis pertanian. Disisi lain, dengan memperbanyak pusat pertumbuhan akan mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah, dengan memperhatikan daya saing dan keunggulan komoditi yang akan dikembangkan. Pada akhirnya, pembangunan ekonomi wilayah terutama pada wilayah yang menempatkan sektor pertanian sebagai andalan diharapkan mampu memperkuat perekonomian wilayahnya. Pada posisi inilah penelitian tentang Pembangunan Pertanian Berbasis Ekoregion Kuansing (Ketimpangan Pembangunan, Keunggulan Sektor, Daya Saing) dan Kaitannya Dengan Ketahanan Pangan Rumahtangga dan Wilayah Pada Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat penting untuk dilakukan sebagai titik tolak dari urgensi (keutamaan) penelitian ini.

### **1.5. Rencana Target Capaian Tahunan**

Target ini ditetapkan sebagai bagian dari proses penyusunan suatu model pusat pertumbuhan (*growth pole*) Kawasan Perkotaan Baru (KPB) berbasis pertanian. Target itu sendiri harus terbuka, dibahas dan diperdebatkan di antara mereka yang berkepentingan. Sehingga ditemukan atau mengarah pada penentuan sasaran yang spesifik pada masing-masing objek penelitian. Rencana target capaian tahunan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Rencana target capaian tahunan

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian		
			TS	TS +1	TS+2
1	Publikasi Ilmiah	Internasional			
		Nasional Terakreditasi	draft	accepted	
2	Pemakalah dalam Temu Ilmiah	Internasional			
		Nasional	terdaftar	Sudah dilaksanakan	
3	<i>Invited Speaker</i> dalam Temu Ilmiah	Internasional			
		Nasional		Draft	
4	<i>Visiting Lecturer</i>	Internasional			
5	Hak Kekayaan Intelektual	Paten			
		Paten Sederhana			
		Hak Cipta			
		Indikasi Geografis			
6	Teknologi Tepat Guna				
7	Model Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial				
8	Buku Ajar (ISBN)		draft		
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)		5	6	

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. *State of the Art***

#### **1. Konsep Ekeregion**

Berbagai konsep pembangunan berdimensi wilayah telah berkembang dan diterapkan di Indonesia. Menurut Bappenas (2006) berbagai konsep pengembangan wilayah yang pernah diterapkan diantaranya adalah: (1) Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya; (2) konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang; (3) konsep pengembangan wilayah terpadu. Konsep ini menekankan kerjasama antarsektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal; (4) konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster. Konsep ini terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. Klaster yang berhasil adalah klaster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan berorientasi eksternal.

Pengembangan wilayah sesungguhnya merupakan program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan, yang didasarkan atas sumber daya yang ada dan kontribusi pada pembangunan suatu wilayah tertentu. Dengan demikian dalam mengembangkan suatu wilayah diperlukan pendekatan-pendekatan tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik daerah yang bersangkutan. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya, memiliki berbagai pendekatan diantaranya yaitu: (1) pengembangan wilayah berbasis sumber daya; (2) pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan; (3) pengembangan wilayah berbasis efisiensi; (4) pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan.

Perencanaan pembangunan yaitu suatu usaha pemerintah untuk mengkoordinasikan semua keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung serta mengendalikan pertumbuhan variable-variable ekonomi yang penting (penghasilan, konsumsi, lapangan kerja, investasi, tabungan, ekspor-import, dan lain sebagainya) suatu negara dalam rangka mencapai keputusan pendahuluan mengenai tujuan-tujuan pembangunan.

Rencana bisa bersifat komprehensif (multi-sektoral), bisa bersifat parsial (lokal). Rencana yang komprehensif target-nya semua aspek penting yang menyangkut perekonomian nasional, sedangkan yang parsial meliputi sebagian dari ekonomi nasional, seperti sektor pertanian, perindustrian, sektor pemerintahan, sektor swasta dan lain sebagainya (Suryana dalam Lusminah, 2008: 26).

Pengembangan ekonomi lokal dapat diwujudkan dengan mendorong berkembangnya kawasan-kawasan ekonomi produktif dengan mengoptimalkan faktor-faktor kunci pengembangan kawasan yang berdaya saing dengan tetap menekankan kepada inisiatif dan partisipasi masyarakat lokal yang kreatif dan produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal, pemanfaatan sumber daya ekonomi, sosial, teknologi, dan kelembagaan lokal, serta penciptaan lapangan pekerjaan bagi penduduk dan masyarakat setempat. Dalam hal ini peranan pemerintah daerah dan atau kelompok-kelompok berbasis masyarakat (community based-groups) dalam mengelola sumber daya adalah berupaya untuk mengembangkan usaha kemitraan baru dengan pihak swasta, atau dengan pihak lain, untuk menciptakan pekerjaan baru dan mendorong berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi daerah.

Pengembangan ekonomi lokal dapat diwujudkan dengan mendorong berkembangnya kawasan-kawasan ekonomi produktif dengan mengoptimalkan faktor-faktor kunci pengembangan kawasan yang berdaya saing dengan tetap menekankan kepada inisiatif dan partisipasi masyarakat lokal yang kreatif dan produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal, pemanfaatan sumber daya ekonomi, sosial, teknologi, dan kelembagaan lokal, serta penciptaan lapangan pekerjaan bagi penduduk dan masyarakat setempat.

## 2. Ketahanan pangan

Pemantapan ketahanan pangan terkait erat dengan pembangunan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, karenanya merupakan hak asasi manusia untuk tidak mengalami kekurangan pangan. Oleh karena itu, peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan. Dalam program Pembangunan Pertanian, khususnya di bidang pangan, seperti yang diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 1996

tentang Pangan, adalah terjaminnya penyediaan, distribusi, konsumsi pangan dalam jumlah, keamanan dan mutu gizi yang memadai sehingga dapat memenuhi kebutuhan penduduk setiap saat. Ketahanan pangan mencakup tingkat rumah tangga dan tingkat nasional/regional (Anonymous, 1999).

Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan untuk kebutuhan masyarakat secara nasional, tersedia, mudah memperoleh aman dikonsumsi dan harga terjangkau oleh lapisan masyarakat, yang dapat diwujudkan dengan bekerjanya sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi. Soedjana. (2007). Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman pangan, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein dan vitamin serta mineral yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan kesehatan manusia. Selanjutnya Mewa, (2004). Pentingnya program peningkatan ketahanan pangan dimaksudkan untuk mengopreasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan baik ditingkat nasional maupun ditingkat rumahtangga.

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Penyediaan pangan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal Anonymous, (2000).

Ketersediaan pangan ke seluruh wilayah dilakukan distribusi pangan melalui upaya pengembangan sistem distribusi pangan secara efisien, dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan serta menjamin keamanan distribusi pangan. Meningkatkan ketahanan pangan adalah melalui diversifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal melalui peningkatan teknologi pengolahan dan produk pangan dan peningkatan

kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan gizi seimbang. Fagi *et al.*, (2002).

Ketahanan pangan berdimensi sangat luas dan melibatkan banyak sektor pembangunan, keberhasilan pembangunan ketahanan pangan sangat ditentukan tidak hanya oleh performa salah satu sektor saja tetapi juga oleh sektor lainnya Siswono (2001). Dengan demikian sinergi antar sektor sinergi pemerintah dan masyarakat (termasuk dunia usaha) merupakan kunci keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.

Strategi dalam penguatan ketahanan pangan dan mengingat krisis pangan akan bisa berulang pada tahun-tahun mendatang maka perencanaan pembangunan pertanian membutuhkan *political will* pemerintah dan tidak sekedar wacana dalam pidato-pidato politik partai tetapi harus ada aksi nyata yang membutuhkan kerja keras dan program kerja yang masuk akal dan pro petani. Swastika (2004), menyatakan bahwa, ketahanan pangan harus ditempatkan sebagai aktor utama pembangunan pertanian yang akan menyelamatkan dari krisis pangan di masa datang.

Kekhawatiran semakin parahnya krisis pangan menghantui sebagian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB mengingatkan krisis pangan seperti yang terjadi pada 2007/2008 bisa berulang pada tahun 2013 untuk mencegah krisis pangan di Indonesia, ketahanan pangan mutlak diperkuat Siswono (2001). Komoditas seperti kedelai dan daging menurut FAO krisis pangan terjadi karena komoditas pangan tidak terkelola dengan baik, setiap negara diharapkan dapat mengupayakan penyelamatan sendiri negara-negara yang dikenal pengeksport beras seperti Thailand dan Vietnam, ternak sapi dari Australia mulai mengamankan terlebih dahulu kebutuhan dalam negeri, mencermati

Mengembangkan tanaman pangan dan menjamin ketahanan pangan di masa depan merupakan pekerjaan yang relatif sulit dan membutuhkan biaya besar. Kondisi lahan pertanian, termasuk persawahan, selama ini sangat mengkhawatirkan karena terus dikonversi atau beralih fungsi menjadi non pertanian, seperti permukiman, perdagangan, industri, dan jalan, berkurangnya lahan sudah pasti berpengaruh pada aktivitas sektor pertanian dan berkorelasi positif pada defisit

kebutuhan tenaga kerja yang dapat melahirkan lebih banyak lagi pengangguran karena lahan pertanian semakin sempit yang memaksa pelaku sektor meninggalkan pertanian.

Sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal produksi, distribusi, dan penyediaan pangan ditingkat makro (nasional dan regional), tetapi juga menyangkut aspek mikro, yaitu akses pangan di tingkat rumah tangga dan individu serta status gizi anggota rumah tangga Sukirno (2006). Agar aspek mikro tidak terabaikan, maka strategi dalam upaya ketahanan pangan dapat dikatakan sebagai bahan pangan ditingkat nasional

Handewi. *et al.* (2010), mengemukakan bahwa program ketahanan pangan dalam perkembangan dan pada dasarnya ketahanan pangan terdiri dari tiga aspek yaitu, aspek ketersediaan (*food availability*), aspek stabilitas ketersediaan atau pasokan (*access of supplies*), dan aspek keterjangkauan (*access to utilization*). Keempat pilar tersebut mengindikasikan bahwa pangan harus tersedia dalam jumlah cukup dan terjangkau oleh orang yang miskin sekalipun dan aman serta bermutu.

Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, serta aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan, Ketersediaan pangan harus mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat, yang merupakan satu kesatuan yang didukung oleh adanya berbagai input sumberdaya alam, kelembagaan, budaya, dan teknologi. Proses peningkatan ketahanan pangan akan berjalan dengan efisien dengan adanya partisipasi masyarakat dan fasilitasi pemerintah pusat maupun daerah.

Partisipasi masyarakat (petani, nelayan dll) dimulai dari proses produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran serta jasa pelayanan di bidang pangan. Fasilitasi pemerintah diimplementasikan dalam bentuk kebijakan ekonomi makro dan mikro di bidang perdagangan, pelayanan dan pengaturan serta intervensi untuk mendorong terciptanya kemandirian pangan. Output dari pengembangan kemandirian pangan adalah terpenuhinya pangan, SDM berkualitas, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan secara nasional.

Akses dalam penanganan pangan (*food access*), kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumberdaya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan pangan, akses rumah tangga dan individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan social, akses ekonomi tergantung pada pendapatan, kesempatan kerja dan harga, dan kses fisik menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut tentang preferensi pangan.

## **BAB III. METODE PENELITIAN**

### **3.1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Pemilihan daerah penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) yakni di Kabupaten Solok Selatan yang telah membangun Kawasan Perkotaan Baru (KPB). Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua tahun (2017 dan 2018) untuk mencapai seluruh tujuan penelitian.

### **3.2. Metode Penelitian**

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu gabungan antara metode kuantitatif dan metode deskriptif. Metode kuantitatif digunakan karena data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiono, 2012: 7).

Untuk mencapai tujuan penelitian pertama digunakan formula ekonomi regional *location quotient* (LQ) dan untuk tujuan kedua digunakan formula analisis *shift share*. Data diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan metode dokumenter. Metode dokumenter yaitu cara pengumpulan data melalui tertulis, terutama berupa arsip dan juga termasuk buku-buku tertentu, pendapat, teori, atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2010-2014, dan data dinas yang relevan .

Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dari tahun 2010-2014 meliputi:

1. Kontribusi PDRB untuk Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 (data Sumatera barat dalam angka tahun 2015)
2. Distribusi PDRB Kabupaten Pasaman Barat atas dasar harga berlaku (dalam

%) tahun 2010-2014 (data PDRB Kabupaten Pasaman Barat menurut lapangan usaha).

3. Produksi perkomoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2014 (data dari Sumatera Barat dalam Angka 2015).

4. Produksi perkomoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 3 Kabupaten tahun 2010-2014.

### **3.4. Analisis Data**

Analisis data menggunakan pendekatan Location Quotient, Tipologi Klassen, Indeks Williamson, dan Indeks Entropi Theil. Disamping itu juga digunakan analisis ketahanan pangan wilayah dan rumahtangga berdasarkan (WNPG/Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, 2012).

## BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Daerah Tertinggal di Sumatera Barat

Ketimpangan pendapatan di wilayah Provinsi Sumatera Barat dianalisis dengan menggunakan Indeks Theil. Dari hasil analisis pada Tabel 2, diketahui bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2009 – 2013 cenderung berfluktuatif. Di mana mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,0612 dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun berikutnya yaitu sebesar 0,0928. Dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, 3 Kabupaten daerah Tertinggal (Kabupaten Kepulauan Mentawai, Solok Selatan dan Pasaman Barat) memiliki ketimpangan yang relatif rendah dibandingkan dengan daerah lain karena memiliki Indeks Theil yang lebih kecil jika dibandingkan daerah perkotaan. Ketimpangan pendapatan justru lebih besar terjadi di daerah perkotaan yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2. Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2009 – 2013.

No.	Kabupaten	Theil Indeks				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	<b>Kepulauan Mentawai</b>	-0,0020	-0,0038	-0,0015	-0,0038	-0,0048
2	Pesisir Selatan	-0,0250	-0,0202	-0,0277	-0,0212	-0,0188
3	Solok	-0,0208	-0,0201	-0,0148	-0,0142	-0,0118
4	Sijunjung	-0,0099	-0,0061	-0,0072	-0,0077	-0,0078
5	Tanah Datar	-0,0102	-0,0088	-0,0059	-0,0125	-0,0149
6	Padang Pariaman	-0,0068	-0,0047	-0,0048	-0,0044	-0,0025
7	Agam	-0,0186	-0,0171	-0,0136	-0,0234	-0,0142
8	50 Kota	-0,0086	-0,0099	-0,0025	-0,0120	-0,0112
9	Pasaman	-0,0146	-0,0139	-0,0132	-0,0191	-0,0196
10	<b>Solok Selatan</b>	-0,0084	-0,0103	-0,0097	-0,0088	-0,0096
11	Dharmasraya	-0,0077	-0,0111	-0,0098	-0,0121	-0,0131
12	<b>Pasaman Barat</b>	-0,0019	-0,0087	-0,0040	-0,0006	0,0018
13	Kota Padang	0,2167	0,2157	0,1674	0,2261	0,2074
14	Kota Solok	0,0009	0,0021	0,0015	0,0014	0,0009
15	Kota Sawahlunto	0,0037	0,0007	0,0010	-0,0005	0,0001
16	Kota Padang Panjang	0,0000	0,0004	0,0014	0,0011	0,0004
17	Kota Bukit Tinggi	0,0007	0,0033	0,0040	0,0019	0,0014
18	Kota Payakumbuh	-0,0027	-0,0037	-0,0019	-0,0027	-0,0034
19	Kota Pariaman	0,0038	0,0028	0,0026	0,0051	0,0020
	Sumatera Barat	0,0887	0,0865	0,0612	0,0928	0,0823

Tingginya angka ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan disebabkan karena struktur ekonomi daerah tersebut telah didominasi oleh sektor industri. Sektor industri bisa menyebabkan tingginya ketimpangan pendapatan karena sektor ini tumbuh tidak secara merata dan pendapatan di sektor ini juga relatif lebih besar dibandingkan sektor lain. Dan dari hasil studi empiris menunjukkan bahwa sektor industri merupakan sektor yang paling besar kontribusinya dalam ketimpangan pendapatan wilayah (Akita,1995; Etharina,2004; Juhandi,2016).

Kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat memiliki angka ketimpangan pendapatan yang relatif rendah dibandingkan daerah lainnya disebabkan karena pengaruh sektor pertanian yang masih dominan pada struktur ekonomi daerahnya. Bisa dilihat pada Tabel 3, sektor pertanian memiliki kontribusi yang bernilai negatif, artinya adanya sektor pertanian mampu mengurangi ketimpangan pendapatan wilayah di ketiga daerah kabupaten tertinggal ini. Namun sektor industri sesuai dengan studi empiris sebelumnya, justru memiliki kontribusi yang bernilai positif, artinya sektor industri menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan wilayah di ketiga kabupaten daerah tertinggal.

Tabel 3. Kontribusi Sektor Ekonomi dalam Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat.

Sektor Ekonomi	Tahun	Kep. Mentawai	Solok Selatan	Pasaman
Pertanian	2009	-0,93	-0,49	-3,53
	2010	-1,11	-0,46	-2,75
	2011	-0,53	-0,18	-2,55
	2012	-0,55	-0,05	-3,33
	2013	-0,63	-0,09	-2,97
Industri	2009	0,25	0,30	1,25
	2010	0,28	0,26	1,12
	2011	0,27	0,28	1,02
	2012	0,28	0,35	1,21
	2013	0,30	0,25	0,93
Jasa	2009	-0,12	-0,21	-0,33
	2010	0,00	-0,11	-0,37
	2011	-0,23	-0,39	-0,16
	2012	-0,15	-0,70	-0,18
	2013	-0,12	-0,49	-0,36

Sumber: Hasil Analisis

## 4.2. Klasifikasi Pertumbuhan Sektor Ekonomi Wilayah di Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat.

### 4.2.1. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Ekonomi

#### 1. Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kabupaten Kepulauan Mentawai yang secara geografis merupakan satu-satunya daerah kabupaten yang terpisahkan oleh lautan dengan daerah kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga banyak sektor ekonomi yang tidak berkembang di Kabupaten ini. Sektor ekonomi yang berkontribusi besar dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Sektor Pertanian dan sektor Perdagangan, Hotel dan restoran mencapai 53,76 persen dan 22,18 persen yang lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dalam PDRB Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 23,18 persen dan 18,19 persen. Sedangkan sektor lainnya tidak lebih besar kontribusinya dibandingkan kontribusi sektor ekonomi dalam PDRB Sumatera Barat. Namun, ada beberapa sektor ekonomi di Kabupaten Mentawai yang memiliki pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor ekonomi Provinsi Sumatera Barat yaitu Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Air dan Gas, dan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Tabel 4. Perbandingan Rata-rata Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Provinsi Sumatera Barat.

No.	Sektor Ekonomi	Kepulauan Mentawai		Sumatera Barat	
		Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan
1	Pertanian	53,76	4,64	23,18	4,18
2	Pertambangan dan Penggalian	0,39	5,4	3,02	4,36
3	Industri	8,38	2,59	12,27	4,46
4	Listrik, Air dan Gas	0,13	6,8	1,12	4,09
5	Bangunan	2,71	7,95	5,33	8,47
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	22,18	5,36	18,19	6,04
7	Pengangkutan dan Komunikasi	6,32	7,05	14,95	8,43
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,11	6,94	5,13	5,77
9	Jasa-jasa	5,03	5,9	16,8	7,2

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder Tahun 2009 - 2013

Berdasarkan perbandingan di atas maka sektor ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat diklasifikasikan berdasarkan analisis Tipologi Klassen sebagai berikut:

- a. Hanya ada satu sektor ekonomi yang masuk ke dalam kuadran I yaitu Sektor Pertanian. Artinya sektor pertanian merupakan sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (*developed sector*) karena sektor ini memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Sektor ekonomi yang masuk dalam kuadran II sebagai sektor yang maju tapi tertekan (*stagnant sector*) yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Listrik, Air dan Gas, dan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Artinya ketiga sektor ini memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhannya di tingkat provinsi, namun kontribusinya lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut pada tingkat provinsi.
- c. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran menjadi satu-satunya sektor yang masuk dalam kuadran III atau yang disebut sektor potensial (*developing sector*). Artinya sektor ini memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan kontribusinya pada tingkat provinsi, namun pertumbuhannya lebih kecil dibandingkan pertumbuhannya pada tingkat provinsi.
- d. Dan ada empat sektor ekonomi yang masuk dalam kuadran IV yang disebut sektor yang relatif tertinggal (*underdeveloped sector*) yaitu Sektor Industri, Sektor Bangunan, Sektor Pengangkutan dan komunikasi, dan Sektor Jasa-jasa. Artinya sektor tersebut memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi dan pertumbuhannya pada tingkat provinsi.

Tabel 5. Hasil Analisis Tipologi Klasen Sektor Ekonomi di Kabupaten Mentawai

No.	Sektor Ekonomi	Kuadran
1	Pertanian	I
2	Pertambangan dan Penggalian	II
3	Industri	IV
4	Listrik, Air dan Gas	II
5	Bangunan	IV
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	III
7	Pengangkutan dan Komunikasi	IV
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	II
9	Jasa-jasa	IV

## 2. Kabupaten Solok Selatan

Kabupaten Solok Selatan yang terletak pada bagian timur Sumatera Barat yang masuk dalam kategori daerah tertinggal, sebenarnya jika dilihat dari kontribusi dan pertumbuhan sektor ekonominya relatif lebih baik dibandingkan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini bisa disebabkan posisi geografis Kabupaten Solok Selatan yang tidak dipisahkan oleh laut dan berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten/kota serta provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Sektor ekonomi yang memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan kontribusinya pada tingkat provinsi yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan hampir semua sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhannya pada tingkat provinsi, kecuali sektor pengangkutan dan komunikasi.

Tabel 6. Perbandingan rata-rata Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Solok Selatan dan Provinsi Sumatera Barat.

No.	Sektor Ekonomi	Solok Selatan		Sumatera Barat	
		Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan
1	Pertanian	36,81	5	23,18	4,18
2	Pertambangan dan Penggalian	6,8	6,76	3,02	4,36
3	Industri	9,7	5,25	12,27	4,46
4	Listrik, Air dan Gas	0,77	7,75	1,12	4,09
5	Bangunan	7,92	8,87	5,33	8,47
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	19,08	6,8	18,19	6,04
7	Pengangkutan dan Komunikasi	6,65	7,58	14,95	8,43
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,37	6,23	5,13	5,77
9	Jasa-jasa	9,9	6,9	16,8	7,2

Berdasarkan perbandingan di atas maka sektor ekonomi di Kabupaten Solok Selatan dapat diklasifikasikan berdasarkan analisis Tipologi Klassen sebagai berikut:

- a. Ada empat sektor ekonomi yang masuk dalam kuadran I atau yang disebut sektor maju (*developed sector*) yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Artinya sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan kontribusi dan pertumbuhannya pada tingkat provinsi.
- b. Sektor industri, sektor listrik, air dan gas, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan masuk dalam kuadran II yang disebut sektor maju tapi tertekan (*stagnant sector*). Artinya sektor-sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhannya pada tingkat provinsi, namun kontribusinya lebih rendah dibandingkan kontribusinya pada tingkat provinsi.
- c. Tidak ada satu sektor pun di Kabupaten Solok Selatan yang masuk dalam Kuadran III (*potencial sector*).
- d. Dan dua sektor ekonomi yang masuk dalam kuadran IV yang disebut sektor relatif tertinggal (*underdeveloped sector*) yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa. Artinya sektor-sektor ini memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi dan pertumbuhannya pada tingkat provinsi.

Tabel 7. Hasil Analisis Tipologi Klassen Sektor Ekonomi di Kab.Solok Selatan.

No.	Sektor Ekonomi	Kuadran
1	Pertanian	I
2	Pertambangan dan Penggalian	I
3	Industri	II
4	Listrik, Air dan Gas	II
5	Bangunan	I
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	I
7	Pengangkutan dan Komunikasi	IV
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	II
9	Jasa-jasa	IV

### 3. Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman Barat merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pasaman pada tahun 2003. Dan ternyata pemekaran wilayah tidak bisa menjamin daerah tersebut bisa keluar dari kategori daerah tertinggal. Kondisi sektor ekonomi Kabupaten Pasaman Barat tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Solok Selatan. Ada beberapa sektor ekonomi yang memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan kontribusinya ditingkat provinsi yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhannya di tingkat provinsi yaitu sektor pertanian, sektor industri, sektor listrik, air dan gas, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Tabel 8. Perbandingan Rata-rata Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Pasaman Barat dan Provinsi Sumatera Barat.

No.	Sektor Ekonomi	Pasaman Barat		Sumatera Barat	
		Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan
1	Pertanian	32,92	7,16	23,18	4,18
2	Pertambangan dan Penggalian	0,87	3,99	3,02	4,36
3	Industri	22,06	5,52	12,27	4,46
4	Listrik, Air dan Gas	0,13	5,82	1,12	4,09
5	Bangunan	3,16	6,79	5,33	8,47
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	26,66	7,14	18,19	6,04
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3,42	6,03	14,95	8,43
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,86	5,85	5,13	5,77
9	Jasa-jasa	8,91	4,2	16,8	7,2

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder Tahun 2009 – 2013.

Berdasarkan perbandingan di atas maka sektor ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat dapat diklasifikasikan berdasarkan analisis Tipologi Klassen sebagai berikut:

- a. Sektor ekonomi yang masuk dalam kuadran I atau sektor maju (*developed sector*) adalah sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Artinya sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi dan

pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan kontribusi dan pertumbuhannya ditingkat provinsi.

- b. Hanya ada dua sektor ekonomi yang masuk dalam kuadran II atau sektor maju tapi tertekan (*stagnant sector*) yaitu sektor listrik, air dan gas, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Artinya sektor ini memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan kontribusinya di tingkat provinsi, namun pertumbuhan sektor-sektor tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhannya di tingkat provinsi.
- c. Sama halnya dengan Kabupaten Solok Selatan, di Kabupaten Pasaman Barat tidak ada sektor ekonominya yang masuk dalam kuadran III.
- d. Dan ada empat sektor ekonomi yang masuk dalam kuadran IV atau sektor relatif tertinggal (*underdeveloped sector*) yaitu sektor pertambangan dan penggalan, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa. Artinya sektor-sektor ini memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi dan pertumbuhannya pada tingkat provinsi.

### **4.3. Komoditi Unggulan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat.**

#### 4.3.1 Subsektor Pangan

Subsektor pangan yang terdiri dari beberapa komoditi yang kemudian dianalisis menggunakan LQ untuk menentukan komoditi unggulan suatu daerah. berdasarkan hasil analisis LQ terhadap subsektor pangan menunjukkan bahwa pada tiga daerah kabupaten tertinggal di Provinsi Sumatera Barat memiliki komoditi unggulan yang berbeda. Komoditi unggulan di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk subsektor pangan adalah komoditi Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kedelai dan Kacang Hijau. Kabupaten Solok Selatan memiliki komoditi unggulan yaitu Padi, Kacang Tanah, Kedelai dan Kacang Hijau. Sedangkan Kabupaten Pasaman Barat memiliki komoditi unggulan yaitu Jagung, Kacang Tanah, Kedelai dan Kacang Hijau. Komoditi-komoditi tersebut menjadi komoditi unggulan karena memiliki nilai  $LQ > 1$ .

Tabel 9. Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Subsektor Pangan di Kabupaten Daerah Tertinggal Tahun 2009 – 2013.

No.	Komoditi	Kabupaten		
		Kepulauan Mentawai	Solok Selatan	Pasaman Barat
1	Padi	0,27	<b>1,09</b>	0,44
2	Jagung	0,44	0,49	<b>5,30</b>
3	Ubi Kayu	<b>16,69</b>	0,45	0,35
4	Ubi Jalar	<b>11,45</b>	0,34	0,35
5	Kacang Tanah	<b>3,82</b>	<b>1,27</b>	<b>2,48</b>
6	Kedelai	<b>2,03</b>	<b>1,77</b>	<b>2,55</b>
7	Kacang Hijau	<b>12,79</b>	<b>1,23</b>	<b>3,48</b>

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder

#### 4.2.1 Subsektor Hortikultura

Subsektor Hortikultura memiliki banyak komoditi dibandingkan subsektor pangan. Namun, dari banyaknya komoditi tersebut yang menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Mentawai hanya komoditi Kacang Panjang, Cabai Rawit, Cabai, Kangkung, Duku dan Rambutan. Kabupaten Solok Selatan memiliki komoditi unggulan yaitu Kentang, Kacang panjang, Cabai rawit, Buncis, Kangkung, Bayam, Duku dan Pepaya. Kemudian Kabupaten Pasaman Barat memiliki Komoditi Unggulan yaitu Kacang Panjang, Cabai Rawit, Cabai, Terung, Ketimun, Kangkung, Bayam, Sawo, Rambutan dan Mangga.

Tabel 10. Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Subsektor Hortikultura di Kabupaten Daerah Tertinggal Tahun 2009 – 2013.

No.	Komoditi	Kabupaten		
		Kepulauan Mentawai	Solok Selatan	Pasaman Barat
1	Bawang Merah	-	0,44	-
3	Bawang Daun	-	0,04	0,03
4	Kentang	-	<b>1,73</b>	-
5	Kol/Kubis	-	0,43	-
6	Sawi	-	0,10	0,16
7	Kacang panjang	<b>2,99</b>	<b>1,83</b>	<b>2,04</b>
9	Cabai Rawit	<b>3,66</b>	<b>1,96</b>	<b>6,72</b>
10	Cabai	<b>1,08</b>	0,82	<b>1,04</b>
11	Tomat	0,01	0,26	0,01
12	Terung	0,90	0,84	<b>1,09</b>
13	Buncis	-	<b>1,00</b>	0,21
14	Ketimun	0,26	0,59	<b>1,45</b>
15	Kangkung	<b>12,94</b>	<b>3,05</b>	<b>1,04</b>
16	Bayam	0,58	<b>1,53</b>	<b>1,18</b>
17	Duku	<b>2,73</b>	<b>3,35</b>	0,85
18	Sawo	0,26	0,23	<b>1,06</b>
19	Pepaya	0,86	<b>1,20</b>	0,84
20	Rambutan	<b>4,21</b>	0,49	<b>1,85</b>
21	Alpoket	0,03	0,24	0,24
22	Mangga	0,94	0,61	<b>1,73</b>

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder

#### 4.2.2 Subsektor Perkebunan

Tiga daerah kabupaten tertinggal juga memiliki perbedaan komoditi unggulan untuk subsektor perkebunan. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki komoditi unggulan yaitu Cengkeh, Pala, Lada, Kakao, dan Pinang. Kabupaten Solok Selatan memiliki komoditi unggulan yaitu Karet, Kopi, dan Lada. Sedangkan Kabupaten Pasaman Barat hanya memiliki komoditi unggulan yaitu Lada dan Kelapa Sawit.

Tabel 11. Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Subsektor Perkebunan di Kabupaten Daerah Tertinggal Tahun 2009 – 2013.

No.	Komoditi	Kabupaten		
		Kepulauan Mentawai	Solok Selatan	Pasaman Barat
1	Karet	0,02	<b>1,95</b>	0,24
2	Cengkeh	<b>14,06</b>	0,03	0,04
3	Kopi	0,00	<b>3,61</b>	0,17
4	Pala	<b>15,81</b>	-	0,04
5	Lada	<b>13,30</b>	<b>1,68</b>	<b>1,66</b>
6	Kelapa Sawit	-	0,97	<b>2,74</b>
7	Kakao	<b>1,71</b>	0,29	0,75
8	Pinang	<b>1,70</b>	0,62	0,82
9	Kemiri	0,23	0,02	-

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder

#### 4.4. Komoditi Unggulan yang Memiliki Daya Saing untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat.

##### 4.4.1. Subsektor Pangan

###### 1. Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nilai *Provincial Sector* (Ps) menunjukkan pengaruh kegiatan ekonomi Provinsi Sumatera Barat terhadap pertumbuhan Subsektor pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada Tabel 12, terlihat bahwa kegiatan ekonomi Provinsi Sumatera Barat paling besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan komoditi padi yaitu sebesar Rp 7.086.894.569,- dan paling kecil pengaruhnya terhadap pertumbuhan komoditi kedelai yaitu hanya sebesar Rp 58.438.572,36. Dan nilai *Proportional Shift* (P) menunjukkan pertumbuhan komoditi dilihat dari nilainya positif atau negatif. Semua komoditi pangan di Kepulauan Mentawai memiliki pertumbuhan yang lambat karena memiliki nilai P negatif. Kemudian nilai *Differential Shift* (D) yang menggambarkan daya saing komoditi tertentu, dari tabel tersebut terlihat ada

beberapa komoditi pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki daya saing yang baik yaitu Padi, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah dan Kedelai. Sedangkan komoditi lain seperti Jagung dan Kacang Hijau belum memiliki daya saing karena memiliki nilai D negatif.

Tabel 12. Hasil Analisis *Shift-Share* Subsektor Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No.	Komoditi	Ps	P	D
1	Padi	7.086.894.569,00	-538.909.072,00	656.792.503,00
2	Jagung	445.613.267,59	-33.885.791,61	-47.461.675,99
3	Ubi Kayu	5.793.593.056,38	-440.562.481,52	7.402.507.245,14
4	Ubi Jalar	3.800.565.079,77	-289.006.557,14	2.550.317.037,37
5	Kacang Tanah	879.066.280,94	-66.846.880,40	59.410.769,46
6	Kedelai	58.438.572,36	-4.443.847,23	3.443.974,87
7	Kacang Hijau	538.183.828,59	-40.925.139,33	-299.374.049,27

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder

## 2. Kabupaten Solok Selatan

Komoditi padi merupakan komoditi yang memiliki nilai Ps terbesar untuk Kabupaten Solok Selatan yang berarti kegiatan ekonomi Provinsi Sumatera Barat juga berpengaruh besar terhadap komoditi padi (lihat Tabel 13). Sama halnya dengan pertumbuhan komoditi pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, di Kabupaten Solok Selatan semua komoditi pangan mengalami pertumbuhan yang lambat yang bisa dilihat dari semua nilai P negatif untuk komoditi pangan. Kemudian komoditi yang memiliki daya saing yang baik yaitu Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Kacang Tanah, sedangkan Kedelai dan Kacang Hijau belum memiliki daya saing karena memiliki nilai D negatif.

Tabel 13. Hasil Analisis *Shift-Share* Subsektor Pangan Kabupaten Solok Selatan.

No.	Komoditi	Ps	P	D
1	Padi	1.007.251.015.230,86	-76.594.438.453,52	12.297.227.222,66
2	Jagung	27.201.783.813,14	-2.068.506.583,36	40.845.397.090,22
3	Ubi Kayu	8.474.146.828,22	-644.399.963,73	2.333.633.635,51
4	Ubi Jalar	4.707.518.110,17	-357.974.031,01	3.422.781.750,84
5	Kacang Tanah	11.503.210.190,58	-874.739.177,86	2.300.374.297,28
6	Kedelai	2.259.624.797,77	-171.828.759,55	-205.375.698,22
7	Kacang Hijau	1.661.350.079,57	-126.334.125,75	-228.307.433,82

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder

### 3. Kabupaten Pasaman Barat

Berbeda dengan dua kabupaten tertinggal sebelumnya, kegiatan ekonomi Provinsi Sumatera Barat justru berpengaruh besar terhadap pertumbuhan komoditi Jagung di Kabupaten Pasaman Barat yang bisa dilihat pada nilai Ps di Tabel 14. Namun, pertumbuhan yang lambat untuk semua komoditi pangan juga dialami oleh Kabupaten Pasaman Barat karena memiliki nilai P negatif. Jika dibandingkan dengan dua kabupaten sebelumnya, Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah yang paling sedikit memiliki komoditi yang berdaya saing. Karena hanya ada dua komoditi pangan yang memiliki daya saing yang baik yaitu Padi dan Ubi Kayu karena memiliki nilai D positif. Sedangkan komoditi lainnya memiliki nilai D negatif.

Tabel 14. Hasil Analisis *Shift-Share* Subsektor Pangan Kabupaten Pasaman Barat.

No.	Komoditi	Ps	P	D
1	Padi	889.709.263.887,34	-67.656.205.279,40	54.659.856.392,07
2	Jagung	1.603.691.110.275,44	-121.949.561.913,62	-89.138.914.201,82
3	Ubi Kayu	20.258.306.540,83	-1.540.503.399,90	1.320.460.879,07
4	Ubi Jalar	14.626.417.125,18	-1.112.237.356,28	-1.370.983.628,90
5	Kacang Tanah	62.689.983.920,70	-4.767.137.528,24	-10.495.176.542,46
6	Kedelai	20.726.213.662,27	-1.576.084.484,13	-9.650.851.558,14
7	Kacang Hijau	14.881.952.825,46	-1.131.669.070,09	-4.714.761.955,36

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder

#### 4.4.2. Subsektor Hortikultura

##### 1. Kabupaten Kepulauan Mentawai

Berdasarkan nilai Ps pada Tabel 15, terlihat bahwa kegiatan ekonomi Provinsi Sumatera Barat memiliki pengaruh yang besar terhadap komoditi Duku di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berbeda dengan nilai P pada komoditi pangan yang semua bernilai negatif, semua komoditi hortikultura di Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki pertumbuhan positif. Pertumbuhan yang paling tinggi adalah komoditi Cabai Rawit yang sepanjang tahun 2009 – 2013 mengalami peningkatan nilai produksi sebesar 1.591.069.396,14. Kemudian komoditi yang memiliki daya saing yaitu Duku, Sawo, Rambutan dan Mangga karena memiliki nilai D positif sedangkan komoditi lainnya bernilai negatif.

Tabel 15. Hasil Analisis *Shift-Share* Subsektor Hortikultura Kabupaten Kepulauan Mentawai

No.	Komoditi	Ps	P	D
1	Kacang panjang	1.527.990.856,84	337.212.123,79	-1.165.874.101,44
2	Cabai Rawit	7.209.525.750,64	1.591.069.396,14	-5.398.256.910,78
3	Cabai	6.331.180.077,36	1.397.227.392,06	-4.413.100.317,72
4	Terung	647.969.096,27	143.000.224,20	-494.999.399,28
5	Ketimun	6.629.884,19	1.463.148,37	38.118.832,44
6	Kangkung	2.691.091.027,04	593.896.564,55	-2.062.148.345,49
7	Bayam	23.115.660,98	5.101.392,52	-1.070.959,50
8	Duku	1.184.411.635,86	261.387.665,63	462.558.551,71
9	Sawo	14.769.979,92	3.259.585,15	63.206.868,03
10	Pepaya	145.733.858,84	32.161.988,29	-68.482.777,14
11	Rambutan	66.065.770,37	14.580.047,15	217.169.874,48
12	Alpoket	24.191.742,31	5.338.872,79	-2.638.081,09
13	Mangga	47.594.482,32	10.503.620,75	99.634.506,23

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder

## 2. Kabupaten Solok Selatan

Kegiatan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat berpengaruh paling besar terhadap Komoditi Cabai di Kabupaten Solok Selatan, karena memiliki nilai Ps paling besar dibandingkan dengan komoditi lainnya (lihat Tabel 16). Sama halnya dengan semua komoditi hortikultura di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan pun semua komoditi hortikulturanya memiliki pertumbuhan yang positif dilihat dari nilai P. Di mana peningkatan nilai produksi terbesar pada tahun 2009 – 2013 yaitu komoditi Cabai dengan nilai produksi 14.195.020.316,40. Kemudian komoditi yang memiliki daya saing yang baik hanya komoditi Bawang Daun dan Duku karena memiliki nilai D positif, sedangkan komoditi lainnya belum memiliki daya saing.

Tabel 16. Hasil Analisis *Shift-Share* Subsektor Hortikultura Kabupaten Solok Selatan

No.	Komoditi	Ps	P	D
1	Bawang Merah	8.341.283.322,42	1.840.836.842,51	-615.304.812,43
2	Bawang Daun	100.408.311,56	22.159.098,55	52.685.128,48
3	Kentang	21.125.152.707,26	4.662.107.484,43	-11.648.224.164,19
4	Kol/Kubis	4.869.155.417,79	1.074.573.340,64	-3.385.778.612,13
5	Kacang panjang	5.160.100.270,65	1.138.781.926,25	-514.479.239,90
6	Cabai Rawit	18.864.022.264,84	4.163.098.871,10	-2.188.819.519,94
7	Cabai	64.321.119.336,69	14.195.020.316,40	-35.679.437.763,39
8	Tomat	3.707.806.942,12	818.275.481,14	-1.641.855.370,76
9	Terung	7.472.839.857,97	1.649.180.155,74	-3.162.718.830,51
10	Buncis	10.194.058.192,32	2.249.725.512,22	-6.363.866.916,44
11	Ketimun	3.619.916.768,12	798.879.008,90	-1.438.964.362,02
12	Kangkung	6.851.298.073,95	1.512.012.171,99	-4.865.469.843,64
13	Bayam	955.447.320,41	210.857.557,58	-259.324.978,79
14	Duku	654.291.911,74	144.395.605,61	46.552.578.558,65
15	Sawo	1.269.233.608,22	280.107.016,80	-837.402.906,61
16	Pepaya	3.731.588.991,12	823.523.938,76	-2.233.966.187,88
17	Rambutan	1.507.670.740,74	332.727.679,74	-589.331.397,48
18	Alpoket	2.601.863.594,95	574.204.972,98	-896.575.393,93
19	Mangga	2.719.684.704,15	600.206.899,81	-1.371.652.055,36

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder

### 3. Kabupaten Pasaman Barat

Kegiatan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat bukan hanya berpengaruh besar terhadap komoditi Cabai di Kabupaten Solok Selatan, namun juga terhadap komoditi Cabai di Kabupaten Pasaman Barat (lihat Tabel 17). Bahkan nilainya lebih besar dibandingkan dengan nilai Ps Komoditi Cabai Kabupaten Solok Selatan. Selain mendapatkan pengaruh yang paling besar, ternyata komoditi Cabai juga memiliki pertumbuhan yang paling besar jika dilihat dari nilai P. Komoditi Cabai di Kabupaten Pasaman Barat mengalami peningkatan nilai produksi pada tahun 2009 – 2013 sebesar Rp 22.183.516.057,94. Namun, komoditi yang memiliki daya saing yaitu Bawang Daun dan Terung, karena yang lain memiliki nilai D negatif.

Tabel 17. Hasil Analisis *Shift-Share* Subsektor Hortikultura Kab.Pasaman Barat

No.	Komoditi	Ps	P	D
1	Bawang Daun	70.285.818,09	15.511.368,99	177.189.220,52
2	Sawi	482.716.838,14	106.530.722,65	-411.757.560,79
3	Kacang panjang	10.746.034.058,79	2.371.541.001,75	-5.004.277.075,13
4	Cabai Rawit	99.036.116.890,42	21.856.269.073,27	-43.259.697.406,09
5	Cabai	100.518.953.257,27	22.183.516.057,94	-40.419.202.890,51
6	Tomat	986.692.907,67	217.753.142,59	-841.649.250,26
7	Terung	3.966.539.794,95	875.375.204,22	6.605.941.709,23
8	Buncis	2.228.101.693,87	491.719.502,67	-1.022.172.071,24
9	Ketimun	17.980.245.925,14	3.968.058.373,88	-12.891.638.969,02
10	Kangkung	3.164.777.968,03	698.434.480,25	-1.947.254.535,48
11	Bayam	1.880.073.759,51	414.913.258,47	-846.647.115,58
12	Duku	7.045.577.684,67	1.554.887.716,60	-3.231.288.626,07
13	Sawo	3.662.955.021,40	808.377.115,99	-734.393.384,59
14	Pepaya	2.708.777.963,46	597.799.892,48	-1.442.459.113,24
15	Rambutan	17.705.626.458,38	3.907.452.635,82	-14.062.995.713,21
16	Alpoket	3.666.300.256,43	809.115.375,52	-2.348.963.851,95
17	Mangga	7.888.445.484,38	1.740.900.112,91	-1.373.295.470,69

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder

#### 4.4.3. Subsektor Perkebunan

##### 1. Kabupaten Kepulauan Mentawai

Komoditi Cengkeh di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan komoditi yang mendapatkan pengaruh paling besar dari kegiatan ekonomi Provinsi Sumatera Barat karena memiliki nilai Ps yang paling besar (lihat Tabel 18). Komoditi Cengkeh juga merupakan komoditi yang paling besar pertumbuhannya, di mana sepanjang tahun 2009 – 2013 mengalami peningkatan nilai produksi sebesar Rp 3.893.460.284,45. Komoditi Karet, Pala dan Kakao merupakan komoditi yang memiliki daya saing yang baik karena memiliki nilai D positif, sedangkan komoditi lain bernilai negatif.

Tabel 18. Hasil Analisis *Shift-Share* Subsektor Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai

No.	Komoditi	Ps	P	D
1	Karet	255.757.517,77	21.165.635,86	16.075.006,38
2	Cengkeh	47.047.097.691,84	3.893.460.284,45	-13.736.755.576,28
3	Pala	37.738.233.066,92	3.123.089.815,52	5.010.884.727,56
4	Lada	4.886.049.555,24	404.353.101,99	-1.815.046.157,22
5	Kakao	40.225.997.147,46	3.328.968.841,43	4.817.774.540,41
6	Pinang	1.543.923.618,38	127.769.949,38	-385.822.826,36
7	Kemiri	1.065.453.480,88	88.173.362,78	-434.305.173,66

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder Tahun 2009 - 2013

## 2. Kabupaten Solok Selatan

Kegiatan ekonomi Provinsi Sumatera Barat berpengaruh besar terhadap komoditi perkebunan di Kabupaten Solok Selatan (lihat Tabel 19). Dan komoditi kopi juga merupakan komoditi yang mengalami peningkatan nilai produksi paling besar sepanjang tahun 2009 – 2013 yaitu sebesar Rp 30.453.827.602,17. Sedangkan komoditi yang memiliki daya saing yang baik hanya komoditi Kelapa Sawit dan Kakao karena memiliki nilai D positif, sedangkan komoditi lain belum berdaya saing.

Tabel 19. Hasil Analisis *Shift-Share* Subsektor Perkebunan Kabupaten Solok Selatan

No.	Komoditi	Ps	P	D
1	Karet	182.848.356.809,39	15.131.917.806,64	-28.004.708.336,03
2	Kopi	367.992.504.768,25	30.453.827.602,17	-187.981.729.188,21
3	Lada	2.664.461.506,23	220.501.913,25	-1.004.445.419,48
4	Kelapa Sawit	30.248.069.036,04	2.503.228.918,49	200.977.502.489,97
5	Kakao	35.448.422.706,19	2.933.592.776,69	5.949.865.409,62
6	Pinang	3.088.271.741,47	255.575.029,34	-408.910.145,61
7	Kemiri	1.291.850.234,47	106.909.200,10	-923.759.434,57

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder Tahun 2009 – 2013

## 3. Kabupaten Pasaman Barat

Berbeda dengan dua kabupaten daerah tertinggal sebelumnya, kegiatan ekonomi Provinsi Sumatera Barat justru berpengaruh besar terhadap komoditi Kelapa Sawit di Kabupaten Pasaman Barat karena memiliki nilai Ps paling besar (lihat Tabel 20). Kelapa Sawit juga menjadi komoditi yang mengalami peningkatan nilai produksi paling besar karena memiliki nilai P positif yaitu sebesar Rp 49.621.063.321,06. Sedangkan komoditi yang memiliki daya saing yang baik yaitu Karet dan Cengkeh karena memiliki nilai D positif, sedangkan komoditi lainnya bernilai negatif.

Tabel 20. Hasil Analisis *Shift-Share* Subsektor Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat

No.	Komoditi	Ps	P	D
1	Karet	76.530.518.778,02	6.333.409.498,76	262.904.170.483,23
2	Cengkeh	163.355.142,07	13.518.724,62	82.639.733,31
3	Kopi	69.239.713.056,84	5.730.046.827,95	-42.987.856.690,19
4	Pala	106.239.043,60	8.791.987,54	-75.968.031,14
5	Lada	3.411.810.465,29	282.350.010,87	-2.316.833.476,16
6	Kelapa Sawit	599.602.113.052,09	49.621.063.321,06	-10.512.296.143,95
7	Kakao	327.411.305.228,07	27.095.463.399,98	-183.890.687.850,15
8	Pinang	391.902.745,25	32.432.559,05	-209.207.328,50

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder Tahun 2009 – 2013

#### 4.5. Komoditi Prioritas untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat.

Penentuan komoditi prioritas dengan mempertimbangkan nilai LQ dan SSA yang diperoleh dari analisis sebelumnya. Di mana prioritas pertama jika memiliki nilai  $LQ > 1$ , nilai *Proportional* dan *Differential Shift* bernilai positif. Prioritas kedua jika  $LQ > 1$ , nilai *Proportional* dan *Differential Shift* salah satunya ada yang bernilai negatif. Kemudian prioritas ketiga jika nilai  $LQ > 1$ , nilai *Proportional* dan *Differential Shift* bernilai negatif.

##### i. Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak memiliki komoditi pangan yang menjadi prioritas pertama. Pada Tabel 21, Prioritas pertama hanya ada untuk komoditi hortikultura (Duku dan Rambutan) dan Komoditi Perkebunan (Pala dan Kakao). Tidak adanya komoditi pangan sebagai prioritas pertama menunjukkan bahwa komoditi pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum mengalami peningkatan produksi dan/atau belum memiliki daya saing. Namun, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki komoditi yang berdaya saing dan mengalami peningkatan produksi di beberapa komoditi hortikultura dan perkebunan yang menjadi prioritas pertama.

Tabel 21. Komoditi Prioritas di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Prioritas	Komoditi		
	Pangan	Hortikultura	Perkebunan
I		Duku, Rambutan	Pala, Kakao
II	Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kedelai	Kacang Panjang, Cabai Rawit, Cabai, Kangkung	Cengkeh, Lada, Pinang
III	Kacang Hijau		

Sumber: Hasil Analisis LQ dan *Shift Share*

##### ii. Kabupaten Solok Selatan

Kabupaten Solok Selatan hanya memiliki satu komoditi prioritas pertama yaitu Duku (lihat Tabel 22). Sedangkan komoditi pangan dan perkebunan tidak ada komoditi prioritas pertama. Hal ini menunjukkan bahwa komoditi pangan dan perkebunan belum mengalami peningkatan produksi dan/atau belum memiliki daya saing. Namun, pemerintah daerah bisa mengembangkan komoditi prioritas kedua untuk komoditi pangan (Padi dan Kacang Hijau) dan komoditi perkebunan (Karet, Kopi dan Lada).

Tabel 22. Komoditi Prioritas di Kabupaten Solok Selatan

Prioritas	Komoditi		
	Pangan	Hortikultura	Perkebunan
I		Duku	
II	Padi, Kacang Tanah	Kentang, Kacang Panjang, Cabai Rawit, Kangkung, Bayam, Pepaya	Karet, Kopi, Lada
III	Kedelai, Kacang Hijau		

Sumber: Hasil Analisis LQ dan *Shift Share*

iii. Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman Barat bahkan tidak memiliki komoditi pangan yang menjadi prioritas pertama dan kedua (lihat Tabel 23). Namun pemerintah daerah bisa mengembangkan beberapa komoditi pangan yang menjadi prioritas ketiga yang menjadi sektor basis tetapi belum memiliki daya saing. Kabupaten Pasaman Barat hanya memiliki satu komoditi prioritas pertama yaitu komoditi hortikultura (Terung). Untuk komoditi perkebunan, pemerintah daerah bisa mengembangkan komoditi prioritas kedua yaitu Lada dan Kelapa Sawit yang memiliki daya saing.

Tabel 23. Komoditi Prioritas di Kabupaten Pasaman Barat

Prioritas	Komoditi		
	Pangan	Hortikultura	Perkebunan
I		Terung	
II		Kacang Panjang, Cabai Rawit, Cabai, Ketimun, Kangkung, Bayam, Sawo, Rambutan, Mangga	Lada, Kelapa Sawit
III	Jagung, Kacang Tanah, Kedelai, Kacang Hijau		

Sumber: Hasil Analisis LQ dan *Shift Share*

**4.6. Keterkaitan antara Ketimpangan Pendapatan, Daya Saing dan Komoditi Unggulan di Kabupaten Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat.**

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Indeks Theil untuk mengetahui ketimpangan pendapatan wilayah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa ketimpangan pendapatan di kabupaten daerah tertinggal relatif rendah dibandingkan dengan daerah lainnya yang berada di Sumatera

Barat. Beberapa hasil studi sebelumnya menunjukkan bahwa daerah yang struktur ekonominya masih didominasi oleh sektor pertanian, memiliki ketimpangan pendapatan yang relatif rendah. Bisa dilihat pada kontribusi sektor pertanian pada PDRB setiap kabupaten daerah tertinggal pada Tabel 24. Dari sembilan sektor ekonomi, sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Mentawai berkontribusi sebesar lebih 50 persen dari tahun 2009 – 2013. Di Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman Barat, sektor pertanian berkontribusi lebih dari 30 persen dalam PDRB masing-masing daerahnya. Sektor pertanian berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan karena sektor ini merupakan sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan masih banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, serta sektor ini tumbuh secara merata hampir di seluruh wilayah.

Tabel 24. Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB Daerah Kabupaten Tertinggal tahun 2009 – 2013 (Persen)

Kabupaten	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kep. Mentawai	53,92	53,83	53,79	53,49	53,29
Solok Selatan	37,68	37,07	36,56	36,07	35,52
Pasaman Barat	32,60	32,821	33,03	33,27	33,46

Sumber: BPS Data diolah

Selain itu juga dominasi sektor pertanian bisa terlihat dari ketiga kabupaten daerah tertinggal, di mana berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen terlihat bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang masuk dalam kuadran I, artinya di ketiga kabupaten daerah tertinggal ini sektor pertanian memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian berdasarkan hasil analisis LQ terhadap komoditi sektor pertanian di daerah kabupaten tertinggal menunjukkan bahwa setiap daerah kabupaten tertinggal memiliki beberapa komoditi unggulan. Dari Tabel 25, terlihat beberapa komoditi unggulan dari ketiga kabupaten daerah tertinggal. Di setiap sub-sektor, kabupaten daerah tertinggal memiliki komoditi unggulan.

Tabel 25. Komoditi Unggulan Daerah Kabupaten Tertinggal

Komoditi	Kabupaten		
	Kep. Mentawai	Solok Selatan	Pasaman Barat
Pangan	Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kedelai, Kacang Hijau	Padi, Kacang Tanah, Kedelai, Kacang Hijau	Jagung, Kacang Tanah, Kedelai, Kacang Hijau
Hortikultura	Kacang Panjang, Cabai Rawit, Cabai, Duku, Rambutan	Kentang, Kacang Panjang, Cabai Rawit, Buncis, Kangkung, Bayam, Duku, Pepaya	Kacang Panjang, Cabai Rawit, Cabai, Terung, Ketimun, Kangkung, Bayam, Sawo, Rambutan, Mangga
Perkebunan	Cengkeh, Pala, Lada, Kakao, Pinang	Karet, Kopi, Lada	Kelapa Sawit, Lada

Sumber: Hasil Analisis LQ

Selain memiliki komoditi unggulan, berdasarkan analisis *Shift-Share* kabupaten daerah tertinggal ini memiliki juga beberapa komoditi yang berdaya saing (lihat Tabel 26). Di mana komoditi yang memiliki daya saing ini berarti keunggulan komparatif terhadap sektor yang sama pada Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Sumatera Barat dan mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya.

Tabel 26. Komoditi Berdaya Saing Daerah Kabupaten Tertinggal

Komoditi	Kabupaten		
	Kep. Mentawai	Solok Selatan	Pasaman Barat
Pangan	Padi, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kedelai	Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah	Padi, Ubi Kayu
Hortikultura	Duku, Sawo, Rambutan, Mangga	Bawang Daun, Duku	Bawang Daun, Terung
Perkebunan	Karet, Pala, Kakao	Kelapa Sawit, Kakao	Karet, Cengkeh

Sumber: Hasil Analisis *Shift-Share*

Kabupaten Kepulauan Mentawai, Solok Selatan dan Pasaman Barat memang masuk dalam kategori kabupaten daerah tertinggal. Namun, fenomena yang terjadi bahwa meski masuk dalam daerah tertinggal, ternyata ketimpangan pendapatan wilayah di daerah tertinggal ini relatif kecil dibandingkan dengan

daerah lain yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Artinya, pemerataan pembangunan di kabupaten daerah tertinggal relatif lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Jadi, masuknya ketiga kabupaten tersebut dalam daerah tertinggal bukan karena tingginya ketimpangan pendapatan pada daerah tersebut, tetapi masih banyak faktor ekonomi dan sosial dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 yang menjadi indikator penilaian pemerintah dalam pengkategorian daerah tertinggal. Meskipun demikian, guna mempercepat pembangunan ekonomi dan mengejar ketertinggalan di kabupaten-kabupaten ini, maka berdasarkan analisis komoditi unggulan dan daya saing beberapa komoditi potensial bisa dikembangkan untuk menggerakkan perekonomian daerah kabupaten tertinggal di provinsi Sumatera Barat.

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Keberadaan 3 kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Solok Selatan dan Pasaman Barat menunjukkan belum tercapainya pemerataan pembangunan di provinsi ini. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap ketiga kabupaten daerah tertinggal menunjukkan bahwa:

1. Kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat memiliki ketimpangan pendapatan wilayah yang relatif rendah dibandingkan dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya. Rendahnya ketimpangan pendapatan di kabupaten daerah tertinggal ini karena masih dominannya sektor pertanian dalam struktur ekonomi daerahnya. Dan sektor industri merupakan sektor yang menyebabkan terjadi ketimpangan pendapatan wilayah di daerah kabupaten tertinggal.
2. Ada beberapa komoditi unggulan sektor pertanian (pangan, hortikultura dan perkebunan) di Kabupaten daerah tertinggal.
  - a. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki komoditi pangan unggulan yaitu Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kedelai dan Kacang Hijau. Komoditi hortikultura unggulan yaitu Kacang Panjang, Cabai Rawit, Cabai, Duku, dan Rambutan. Dan komoditi perkebunan unggulan yaitu Cengkeh, Pala, Lada, Kakao, dan Pinang.
  - b. Kabupaten Solok Selatan memiliki komoditi pangan unggulan yaitu Padi, Kacang Tanah, Kedelai, dan Kacang Hijau. Komoditi hortikultura unggulan yaitu Kentang, Kacang Panjang, Cabai Rawit, Buncis, Kangkung, Bayam, Duku, dan Pepaya. Dan komoditi perkebunan unggulan yaitu Karet, Kopi, dan Lada.
  - c. Kabupaten Pasaman Barat memiliki komoditi pangan unggulan yaitu Jagung, Kacang Tanah, Kedelai, dan Kacang Hijau. Komoditi hortikultura unggulan yaitu Kacang Panjang, Cabai Rawit, Cabai, Terung, Ketimun, Kangkung, Bayam, Sawo, Rambutan, dan Mangga. Dan komoditi perkebunan unggulan yaitu Kelapa Sawit dan Lada.

3. Selain memiliki komoditi unggulan, kabupaten daerah tertinggal juga memiliki komoditi yang berdaya saing, antara lain:
  - a. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki komoditi pangan berdaya saing yaitu Padi, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah dan Kedelai. Komoditi hortikultura berdaya saing yaitu Duku, Sawo, Rambutan, dan Mangga. Dan komoditi perkebunan berdaya saing yaitu Karet, Pala, dan Kakao.
  - b. Kabupaten Solok Selatan memiliki komoditi pangan berdaya saing yaitu Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Kacang Tanah. Komoditi hortikultura berdaya saing yaitu Bawang Daun dan Duku. Dan komoditi perkebunan berdaya saing yaitu Kelapa Sawit dan Kakao.
  - c. Kabupaten Pasaman Barat memiliki komoditi pangan berdaya saing yaitu Padi dan Ubi Kayu. Komoditi hortikultura berdaya saing yaitu Bawang Daun dan Terung. Dan komoditi perkebunan berdaya saing yaitu Karet dan Cengkeh.
4. Rendahnya ketimpangan pendapatan wilayah di kabupaten daerah tertinggal yang dikarenakan masih dominannya sektor pertanian dalam struktur ekonomi daerahnya. Hal ini bisa dilihat dari sektor pertanian menjadi *developed sector* dan setiap kabupaten daerah tertinggal memiliki lebih dari satu komoditi unggulan dan komoditi berdaya saing di setiap sub-sektor pertanian.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Solok Selatan dan Pasaman Barat masuk dalam kategori daerah tertinggal berdasarkan beberapa penilaian. Meskipun ketiga daerah ini tergolong daerah tertinggal tetapi angka ketimpangan pendapatan wilayah relatif rendah. Dan daerah tertinggal ini memiliki beberapa komoditi unggulan dan berdaya saing. Di harapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memberikan perhatian khusus terhadap beberapa komoditi unggulan dan berdaya saing untuk dikembangkan sehingga mampu mendorong perekonomian daerahnya dan bisa mengejar ketertinggalan pembangunan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal.

## Daftar Pustaka

- Agusta, Ivanovich.2014. *Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia: Kajian Isu Strategis, Historis, dan Paradigmatik Sejak Pra Kolonial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Akita, Takahiro dan Lukman, Rizal Affandi.1995. *Interregional Inequalities in Indonesia: A Sectoral Decomposition Analysis for 1975-92*. Bulletin of Indonesian Economic Studies. Vol.31, No.2, pp 61-81.
- BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).2013. *Analisis Kesenjangan Antarwilayah 2013*.Jakarta:BAPPENAS
- Badan Agribisnis. 1998. Rencana Induk (Master Plan) Badan Agribisnis Dalam Repelita VII. Badan Agribisnis, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Etharina. 2004. *Ketimpangan Daerah antar Indonesia*. [Tesis] Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik – Fakultas Ekonomi.Universitas Indonesia
- Muharwan. 2014. Analisis Ketimpangan Regional Provinsi Sumatera Barat Tahun 1983–2012. [Tesis] Program Magister Ekonomi Pembangunan. Universitas Gadjah Mada.
- Program. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional BAPPENAS. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2006a. Panduan Pembangunan Kluster Industri Untuk Pengembangan Ekonomi Daerah Berdaya Saing Tinggi. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. Jakarta.
- Sastrosoenarto, Hartarto.2006.*Insutrialisasi Serta Pembangunan Sektor Pertanian dan Jasa Menuju Visi Indonesia 2030*. Jakarta: Imagon Sum Creatius.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius.2012.*Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*.Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sjafrizal. 2009. Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Baduose Media. Padang
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional*. Padang: Baduose Media.
- Soewadji, J. 2012. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sondakh, Lucky W. 2003. *Globalisasi & Desentralisasi: Perspektif Ekonomi Lokal*.Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI
- Widodo, Tri. 2006.*Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer [Era Otonomi Daerah]*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Wirartha, I Made. 2006.*Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*.Yogyakarta: ANDI